

PROFESI PERENCANA WILAYAH

Disampaikan dalam Kuliah Umum
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB
19 Maret 2021

IKA RETNA WULANDARY

Plt. Direktur Regional III

Kedeputan Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas

OUTLINE

01

PROFESI PERENCANA DAN
PELUANG KARIR

02

SEBAGAI PERENCANA KEWILAYAHAN
DI BAPPENAS DAN KEDEPUTIAN
BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL

03

HIGHLIGHT PEKERJAAN DAN
KEGIATAN

04

PENUTUP



01

PROFESI PERENCANA DAN PELUANG KARIR DI INDONESIA

APA SIH PROFESI PERENCANA?

- Profesi perencana adalah profesi yang **dinamis dan terus berkembang** menyesuaikan kemajuan jaman → hal ini berkaitan dengan tuntutan seorang perencana yang **harus membuat perencanaan yang berorientasi ke depan**.
- Profesi perencana memiliki kemampuan dalam **berpikir runtut dan sistematis** dan dalam pekerjaan banyak berperan sebagai *team leader* karena seorang perencana memahami keseluruhan **proses atau POAC (*planning, organizing, actuating, and controlling*)**. Selain merencanakan, profesi perencana juga perlu **menjalankan dan memastikan implementasi dari perencanaan** tersebut.
- Profesi perencana memiliki banyak pengembangan/fokus keahlian seperti analisis lingkungan, perencana transportasi, analisis pengembangan wilayah, dst.
- Profesi perencana memiliki organisasi profesi yaitu Ikatan Ahli Perencana (IAP) sebagai wadah pembinaan profesi, komunikasi, penelitian dan pengembangan, konsultasi antar ahli PWK dan Lembaga lainnya.
- Profesi perencana membutuhkan **pola pikir yang kritis dan komprehensif** sehingga prospek karir terbuka di berbagai sektor.

PELUANG KARIR LULUSAN PERENCANA WILAYAH KOTA (PWK)

Sektor	Institusi/Lembaga
Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah pusat (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, KLHK, dll)• Pemerintah Prov/Kab/Kota (Bappelitbangda, Dinas PUPR, dll)• Badan Pemerintah (BPTJ, BIG, BPPT, Badan Geologi, dll)
Pengajar	<ul style="list-style-type: none">• Perguruan tinggi sebagai pengajar
Peneliti	<ul style="list-style-type: none">• NGO/Lembaga riset (WWF, Semeru, URDI, ITDP, dll)
BUMN/D	<ul style="list-style-type: none">• BUMN (PT. PII, Bina Marga, Adhi Karya, Hutama Karya, Telkom, dll)• BUMD (PT. MRT, PT. BIJB, Jakpro, dll)
Swasta/StartUp	<ul style="list-style-type: none">• Pengembang Kawasan (BSDCity, Sinarmasland, APL)• Management Trainee (all major) → Paragon, Shopee, Gojek, dll)
Konsultan	<ul style="list-style-type: none">• Perusahaan Konsultan Perencanaan (SKHA, Ariaripta, McKinsey, dll)

02

**SEBAGAI PERENCANA
KEWILAYAHAN DI BAPPENAS
DAN KEDEPUTIAN BIDANG
PENGEMBANGAN REGIONAL**

DASAR HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

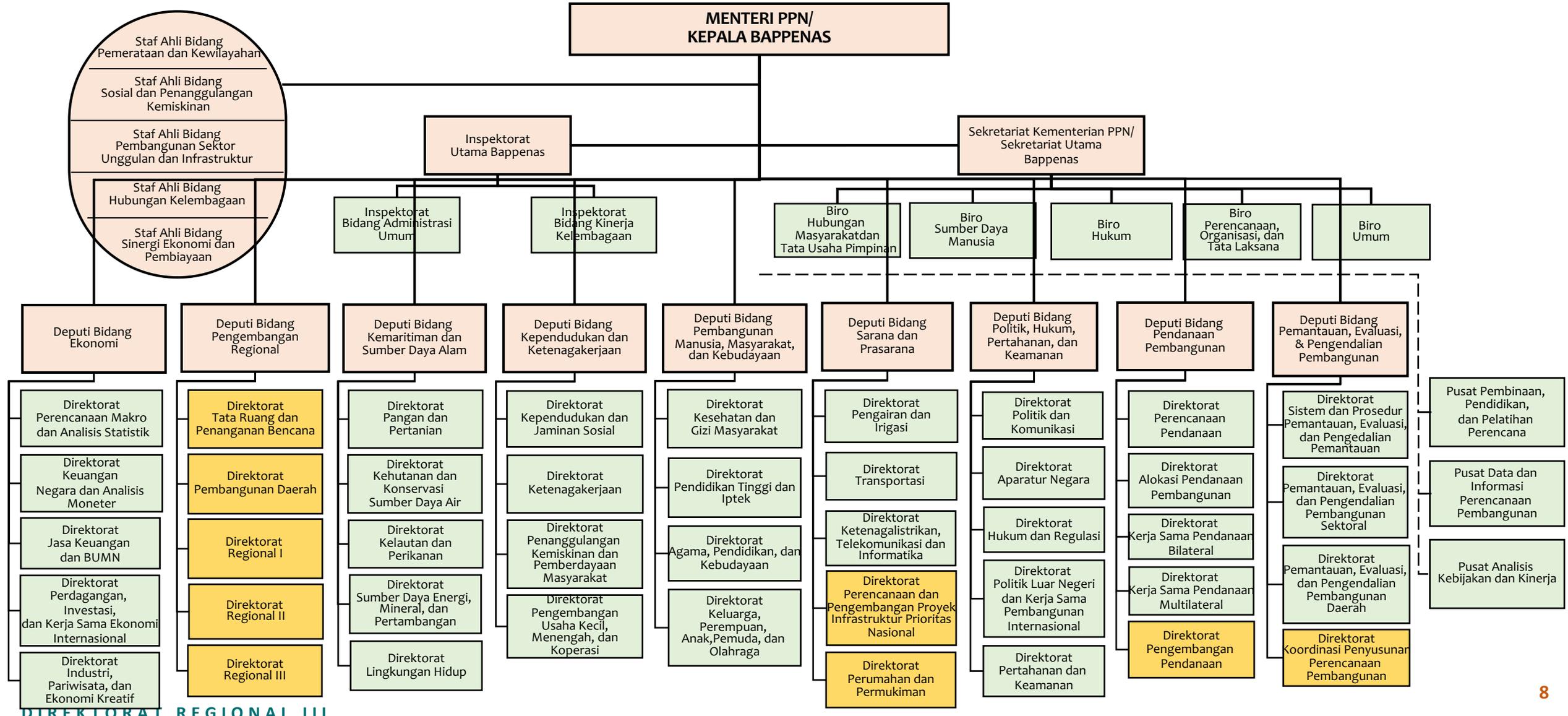
Kerangka regulasi mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 2 ayat (4) → Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

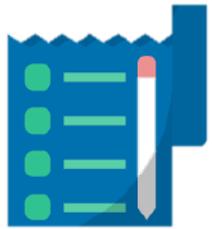
Pasal 3 ayat (1) → Ruang Lingkup perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia

STRUKTUR ORGANISASI ESELON I DAN ESELON II KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS (Sesuai Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 9 Tahun 2019)



DIREKTORAT REGIONAL III

FUNGSI UTAMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



1. Perencanaan

- Perencanaan berbasis analisis dan berorientasi hasil (*delivered*)
- *Clearing house* program



3. Pengendalian

- *E-monev*
- Dashboard Pelaksanaan Rencana
- Tindakan korektif



2. Pengalokasian

- Alokasi pada Prioritas Nasional sampai dengan Proyek Prioritas
- Integrasi sumber-sumber pendanaan



4. Enabler

- Model inovasi pembangunan
- Kajian staregis nasional
- Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan pusat dan daerah
- Peningkatan peran serta kemitraan non pemerintah
- Kerangka kelembagaan dan regulasi

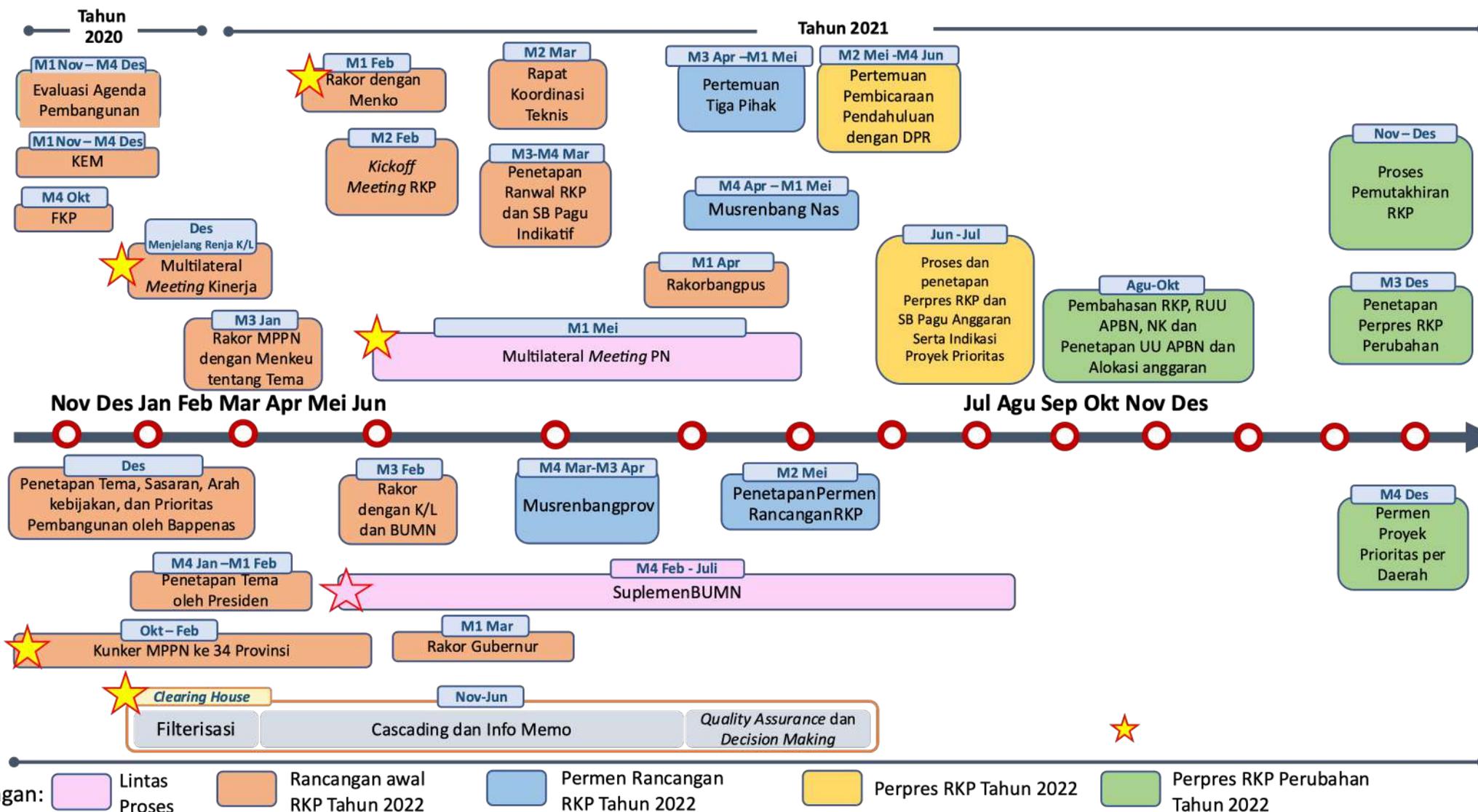
Didukung oleh:

- SDM Perencana yang **Berintegritas**, **Visioner**, **Unggul**
- Satu Data Indonesia
- *Integrated Digital Workspace - Smart Office* (IDW-SO)

PERAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DALAM PEMBANGUNAN (5 TAHUN KE DEPAN)

Perencanaan	Alokasi	Pengendalian	Enabler
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan ekonomi makro • Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan • Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana • Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D • Kesepakatan global 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan • Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan • Melakukan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusianya dan pembiayaannya • Melakukan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan kajian untuk penentuan asumsi baseline kondisi terkini • Mengalokasikan sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome) • Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional • Koordinasi intensif dengan K/L terkait, konsultasi publik dan penguatan peran Kemenko • Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, akademisi, dan kunjungan lapangan • pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi vocal point untuk koordinasi penanganan isu global tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional • Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya. • Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif • Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai • Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko • Meningkatkan peran serta kemitraan non pemerintah serta kegiatan lintas Kemenko • Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think-tank untuk menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan visioner
<p>Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, Think-tank, dan Administrator</p>		<p>Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, dan Think-tank</p>	<p>Pelaksanaan dari peran Enabler dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Think-tank</p>

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2022



ARAHAN PRESIDEN : BAPPENAS SEBAGAI CLEARING HOUSE “MAKING PROGRAM DELIVERED”

Pidato Pelantikan Presiden, 20 Oktober 2019



Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya *sending-sending* saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah *making delivered*. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat.

Sidang Kabinet Paripurna dengan topik RPJMN 2020-2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019)



Sasaran pokok serta prioritas nasional tersambung, termasuk dengan rencana-rencana strategis setiap kementerian. Presiden meminta **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)** dapat menjadi *clearing house*.

HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

“PROYEK PRIORITAS STRATEGIS NASIONAL”

- adalah -

1

Major Project

Berdasarkan PP No 18 Th 2020 tentang RPJMN Tahunn 2020-2024

2

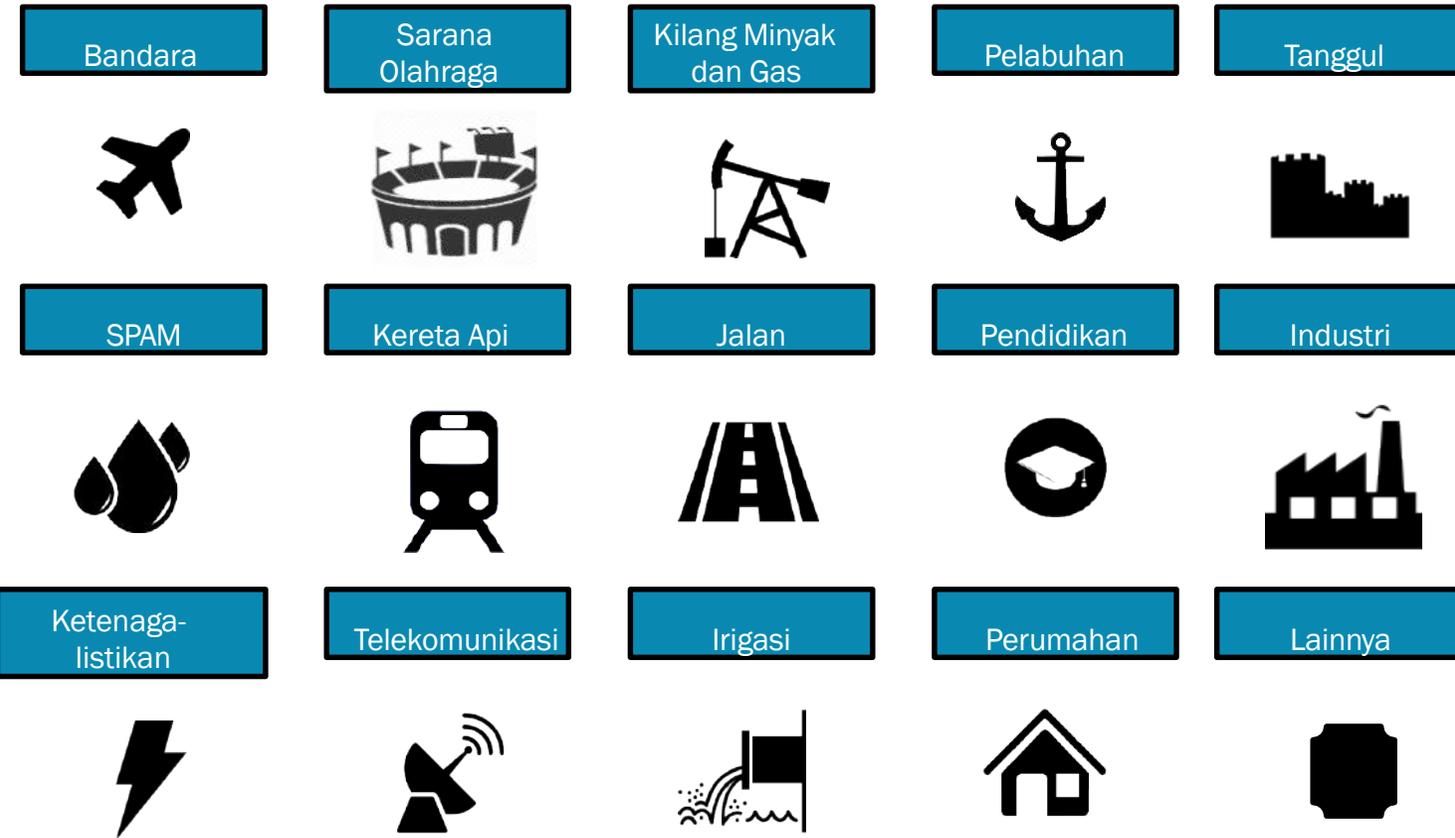
PSN (Proyek Strategis Nasional) Berdasarkan PP No 13 Th 2017 tentang RTRWN

3

Proyek yang Berdampak Besar

Merujuk kriteria pada PP No 13 Th 2017 tentang RTRWN

Sektor-Sektor Pembangunan



PRINSIP CLEARING HOUSE

4 Prinsip Dasar Clearing House¹



1. Bappenas Berwenang Mengatakan Tidak (**Bappenas can say NO**)

* berdasarkan UU 25 Th. 2004 Pasal 6 ayat 2; Pasal 21 ayat 1 & 2; dan PP 17 Th. 2017 Pasal 16

Bappenas berhak menolak usulan program/proyek prioritas nasional yang tidak sesuai dengan kriteria (pinsip "*Bappenas can say no*")



2. Bappenas Berwenang Menentukan Prioritas Pembangunan

* berdasarkan UU 25 Th. 2004 Pasal 4 ayat 3; Pasal 6 ayat 2; Pasal 14 ayat 1; dan PP 17 Th. 2017 Pasal 7 & Pasal 10

Bappenas menentukan prioritas pembangunan dan mengarahkan alokasi anggaran pada Prioritas¹ yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan prinsip "*Bappenas that can say no*"



3. Bappenas Berwenang Memberikan Insentif (**Bappenas can make K/L/Daerah/BUMN/BUMD say YES**)

*berdasarkan UU 25 Th. 2004 Pasal 4 ayat 3; dan PP 17 Th. 2017 Pasal 3 & 4

Bappenas berwenang memberikan insentif bagi K/L/D yang mengikuti prioritas pembangunan dalam bentuk finansial (pendanaan) dan/atau non-finansial (perencanaan penguatan regulasi & kelembagaan, bantuan teknis/pendampingan, penghargaan atau rekognisi)



4. Bappenas Bertanggung Jawab Untuk Mengevaluasi Parameter Clearing House

*berdasarkan Perpres 29/2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Bappenas mengevaluasi pola penentuan prioritas, mekanisme *approval* program prioritas, dan parameter insentif terhadap pencapaian output dan outcome yang diharapkan (transformasi ekonomi).



Penerapan 4 Prinsip

Perencanaan Pembangunan



Penentuan Kriteria Program Prioritas



Approval Terhadap Usulan Program Prioritas



Penyiapan Insentif (Pendanaan, Regulasi, Kelembagaan)

*mengikuti proses eksisting di Bappenas

Pengendalian Perencanaan



Monitoring & Evaluasi Terhadap Program Prioritas



Penyusunan Rekomendasi *Debottlenecking* Berdasarkan Hasil Monev

*contoh penerapan: kunker

PERAN STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL

Sinkronisasi penjabaran sasaran pembangunan nasional (pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks rasio gini, dan indeks pembangunan manusia) menjadi **sasaran pembangunan wilayah**;

Penyusunan kebijakan wilayah untuk menjadi arahan pembangunan sektoral;

Koordinasi dengan pemerintah daerah dan unit kerja sektoral di Bappenas secara iteratif untuk **memetakan dan menyelaraskan kebutuhan pembangunan di daerah** sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional; serta

Penyediaan data dan informasi wilayah, serta analisis kewilayahan berbasis pendekatan THIS dalam kerangka pembangunan nasional di daerah.

TUGAS

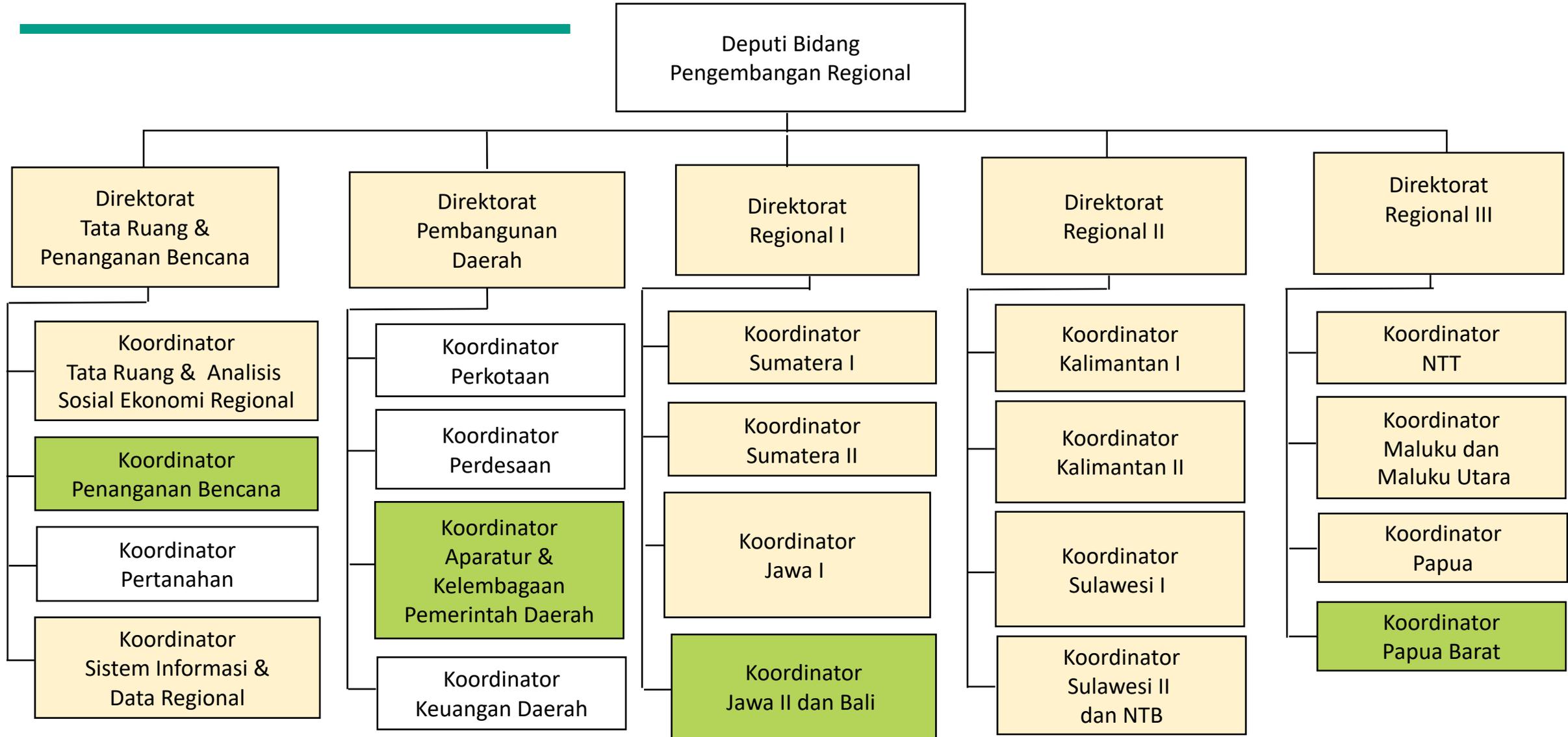
Deputi Bidang Pengembangan Regional mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro regional, serta pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang regional dan infrastruktur pengembangan wilayah.

FUNGSI

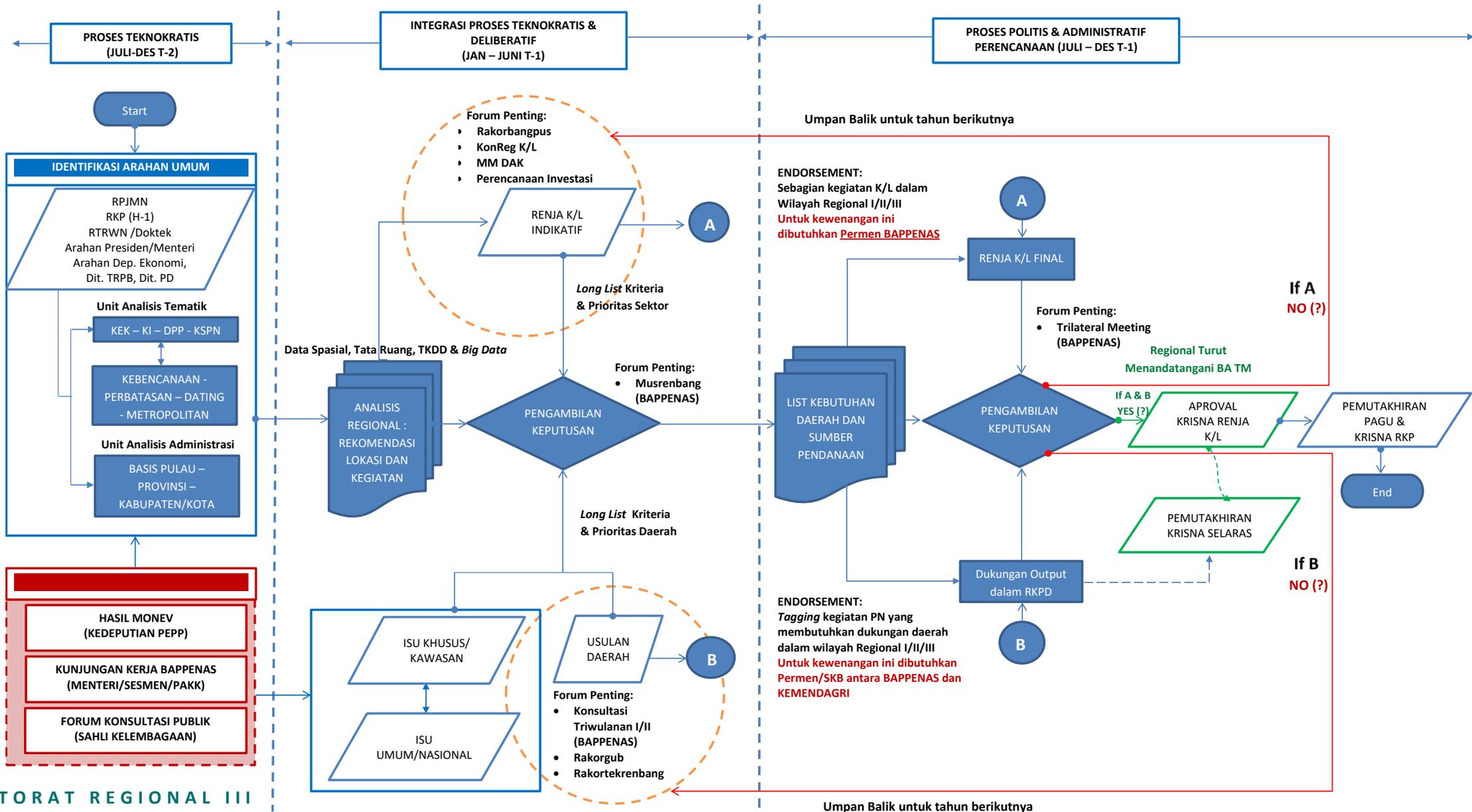
1. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kerangka ekonomi makro regional serta perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengembangan regional dan infrastruktur pengembangan wilayah;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengembangan regional dan infrastruktur pengembangan wilayah;
3. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengembangan regional dan infrastruktur pengembangan wilayah dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengembangan regional dan infrastruktur pengembangan wilayah;
5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan regional dan infrastruktur pengembangan wilayah;
6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan regional dan infrastruktur pengembangan wilayah;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan regional dan infrastruktur pengembangan wilayah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

*Berdasarkan Permen PPN/Kepala
* Bappenas No. 9 Tahun 2019*

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL

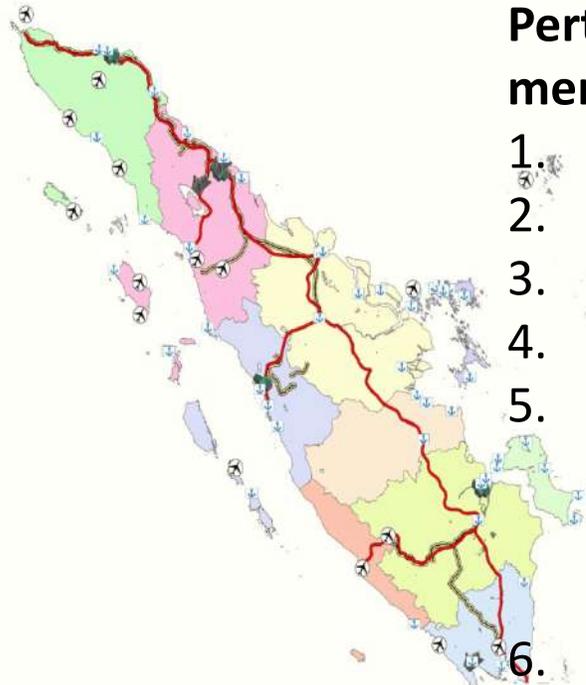


ALGORITMA PROSES BISNIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DALAM KERANGKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN



MENGARAHKAN RENCANA SEKTORAL BERBASIS WILAYAH

Deputi Regional



Pertumbuhan Sumatera 5,6 % memerlukan:

1. Perluasan Lahan
2. Bendungan
3. Irigasi
4. Revitalisasi Hutan
5. Perhubungan
 1. Jalan
 2. Laut
 3. Udara
6. Subsidi Saprodi
7. Kepastian pasar

1. Menyusun Database Daerah
2. Menyusun kebijakan Per Wilayah berdasarkan KEM Nasional
3. Mengkoordinasikan kebijakan per wilayah dg Sektor

Deputi Sektor

Program, Kegiatan, Proyek K/L dan SKPD di Sumatera:

1. Pertanian
2. PU
3. Kehutanan
4. Perhubungan
5. Perdagangan
6. Industri

Renja dan RKA K/L

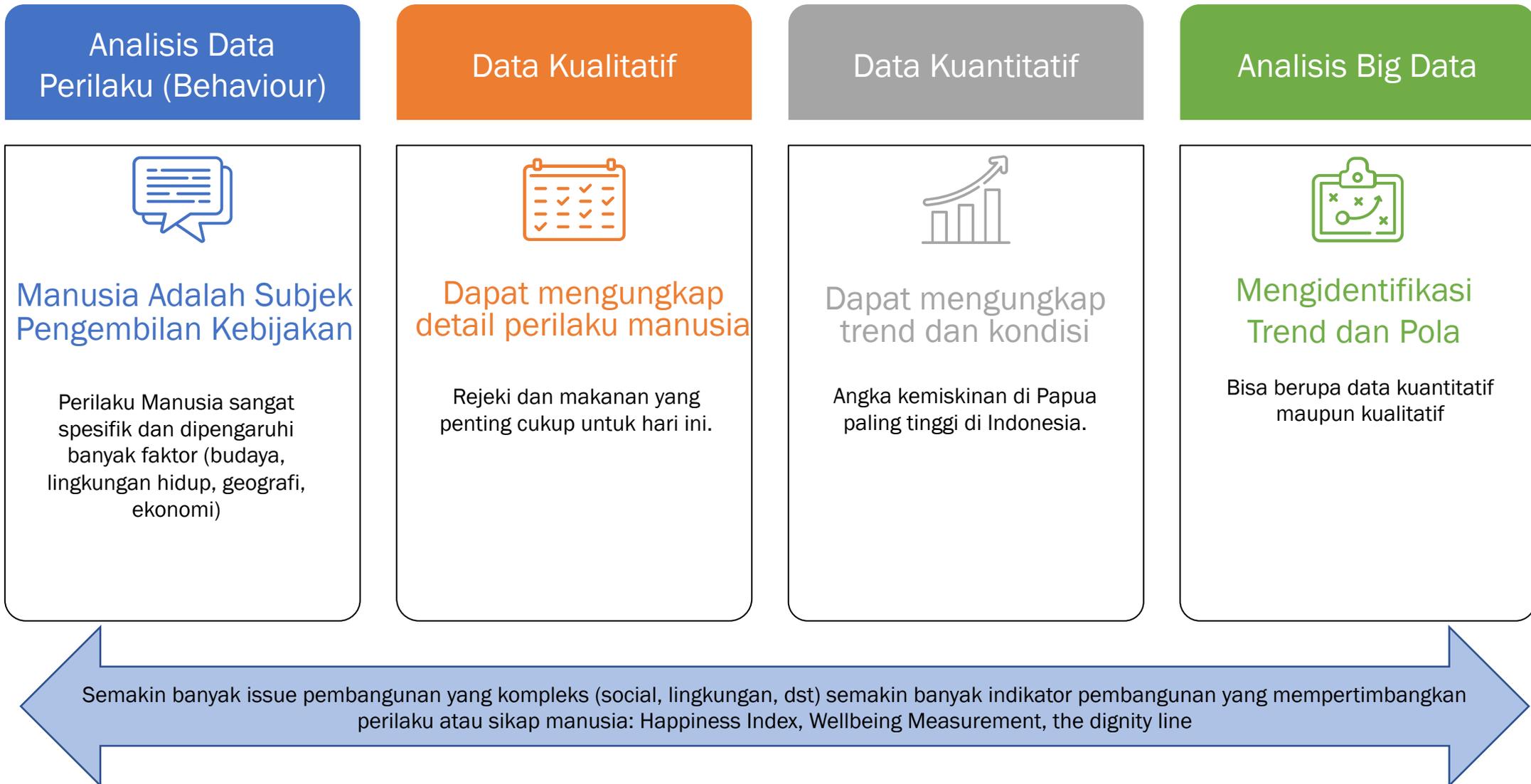
1. Bersama Dep Ekonomi menentukan target pertumbuhan Sektor
2. Berdasarkan kebijakan Wilayah menyusun rencana sektor per wilayah

03

***HIGHLIGHT PEKERJAAN DAN
KEGIATAN***

01. PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN ANALISA

Analisa Perilaku dan BIG Data



01. PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN ANALISA

Data dan Sistem Informasi Regional

DATA MAKRO: TELAH DIKEMBANGKAN



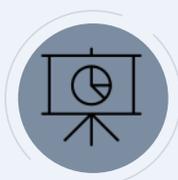
SIMREG

Data sekunder makro Regional



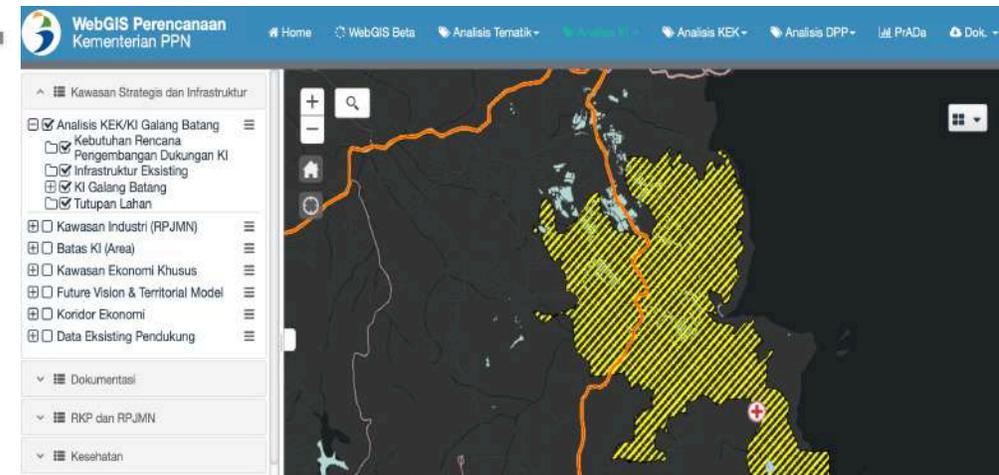
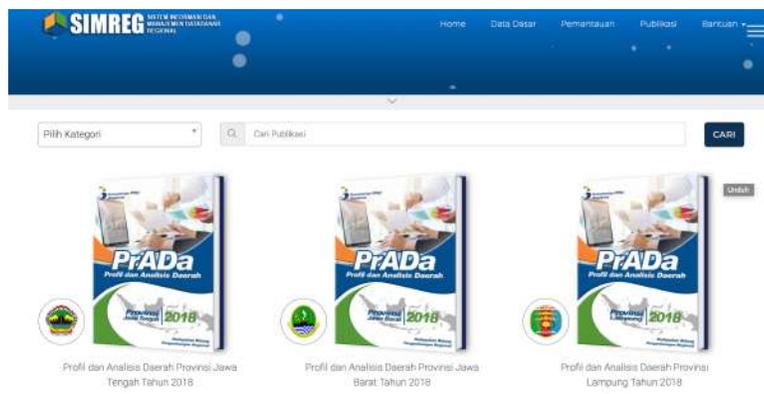
WEBGIS

RKP on the Map



PRADA

Profil dan Analisis Daerah



PrADA#Profil dan Analisis Daerah

Kementerian PPN/
Bappenas
Kedepuan Bidang Pengembangan Regional



01. PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN ANALISA

Analisa Kewilayahan dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi

POTENSI DAERAH

- Perikanan dan Kelautan
- Pertanian dan Perkebunan
- Industri pengolahan
- Pariwisata

Penentuan komoditas unggulan melihat *demand* dan *supply* serta potensi hilirisasinya.

PASAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL

- Potensi ekspor
- Demand nasional dan internasional

Identifikasi potensi dan kebutuhan pasar nasional maupun internasional terhadap produk yang akan/sedang dikembangkan

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR

- Jaringan Jalan
- Jalan KA
- Telekomunikasi
- Bandara
- Pelabuhan
- Air bersih
- Energi

Identifikasi dukungan infrastruktur di Prov/Kab/Kota sehingga mampu memperkirakan kebutuhan logistik dan pendanaan infrastruktur baru

KELEMBAGAAN

- Kerjasama antar Kab/Kota dalam pengembangan potensi unggulan

Identifikasi kerjasama antar Kab/Kota yang sudah terjalin di Provinsi.

MASALAH DAERAH

- Kemiskinan
- Pengangguran
- Keteringgalan
- Keterisolasian
- Sumber daya manusia

Kondisi sosial – ekonomi masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi sehingga dapat memberikan pemerataan pertumbuhan wilayah.

Memperhatikan kawasan eksisting di daerah tersebut untuk mendorong keterkaitan antar kawasan

KAWASAN EKSISTING

- Agropolitan
- Minapolitan
- Kawasan Industri
- Kawasan Pariwisata, dsb

Kws.
Ekonomi

OUTPUT

- Penyerapan tenaga kerja
- Peningkatan PDRB daerah

FAKTOR PENENTU

Kesesuaian RTRW | Ketersediaan dan Kesiapan Lahan | Keterlibatan Masyarakat | Komitmen Pemda | Kerjasama Swasta

02. PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN:

Sasaran dan Arah Kebijakan

SASARAN

Meningkatnya Pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa)



Meningkatnya Keunggulan Kompetitif Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah



Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pelayanan Dasar, Daya Saing serta Kemandirian Daerah



Meningkatnya Sinergi Pemanfaatan Ruang Wilayah



ARAH KEBIJAKAN



1. Pembangunan desa terpadu dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal

2. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan;

3. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan)

4. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa

5. Pengembangan rencana pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi;



6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur)

7. Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;



8. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang,

9. Penyelesaian tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;



10. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah

11. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah



CONTOH KEBIJAKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024 (PERPRES No.. 18/2020)

02. PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN:

Strategi Pembangunan Kawasan

1. Penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di KPPN, Kawasan Transmigrasi, SKPT/WPP
2. Pembangunan smelter pada kawasan potensial dalam mendukung hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA);
3. Penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi, sistem energi, fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah;
4. Pelayanan perijinan dan investasi yang cepat dan efisien;
5. Penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan perdesaan dan transmigrasi, kota-kota kecil, dan kota-kota menengah dalam pengadaan bahan baku dan pendukung;
6. Pengembangan kerjasama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha;
7. Penguatan kerjasama pentahelix antara Pemerintah Daerah, badan pengelola, masyarakat, perguruan tinggi dan media dalam promosi dan pengembangan kawasan strategis;
8. Perluasan kerjasama dan kemitraan dalam kerjasama mata rantai produksi global.



02. PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN:

Persebaran KEK dan KPBPB



Keterangan:

*) KEK Prioritas Ranwal RKP 2021

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang siap menerima investasi

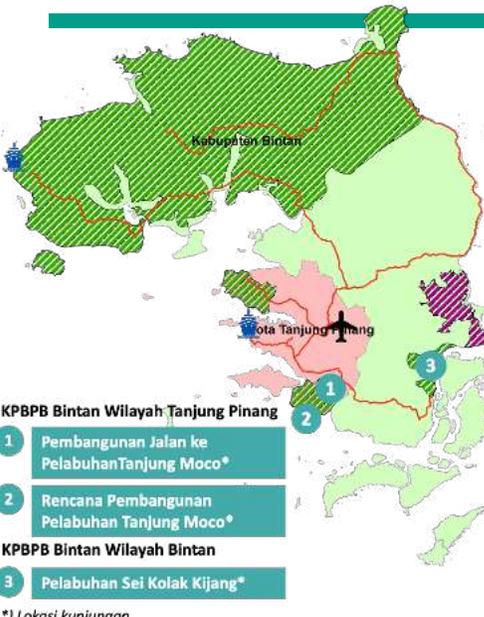
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang belum operasional*

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Operasional

**Operasional adalah "telah dipenuhinya seluruh kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan perangkat pengendalian administrasi" (UU 39/2009 tentang KEK)

03. MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kawasan Strategis: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)



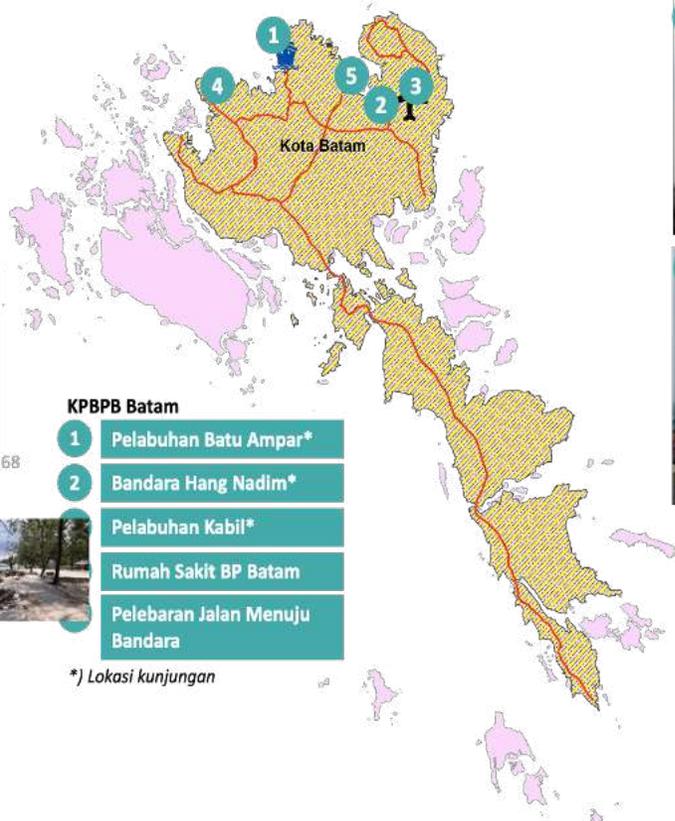
KPBPB Bintan Wilayah Tanjung Pinang

- 1 Pembangunan Jalan ke Pelabuhan Tanjung Moco*
- 2 Rencana Pembangunan Pelabuhan Tanjung Moco*
- 3 Pelabuhan Sei Kolak Kijang*

KPBPB Bintan Wilayah Bintan

- 3 Pelabuhan Sei Kolak Kijang*

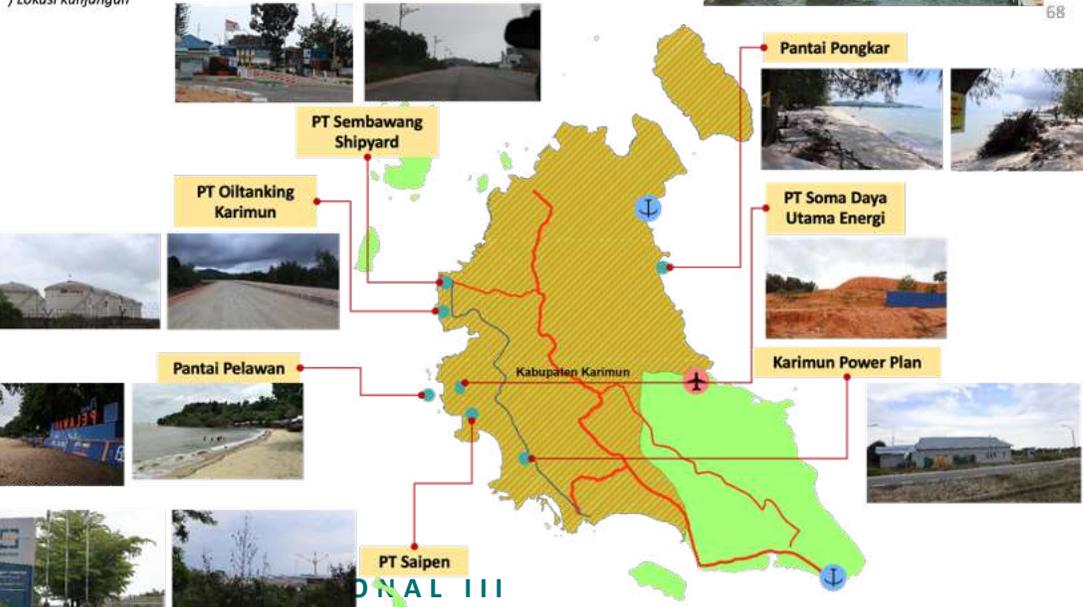
**) Lokasi kunjungan*

KPBPB Batam

- 1 Pelabuhan Batu Ampar*
- 2 Bandara Hang Nadim*
- 3 Pelabuhan Kabil*
- 4 Rumah Sakit BP Batam
- 5 Pelebaran Jalan Menuju Bandara

**) Lokasi kunjungan*

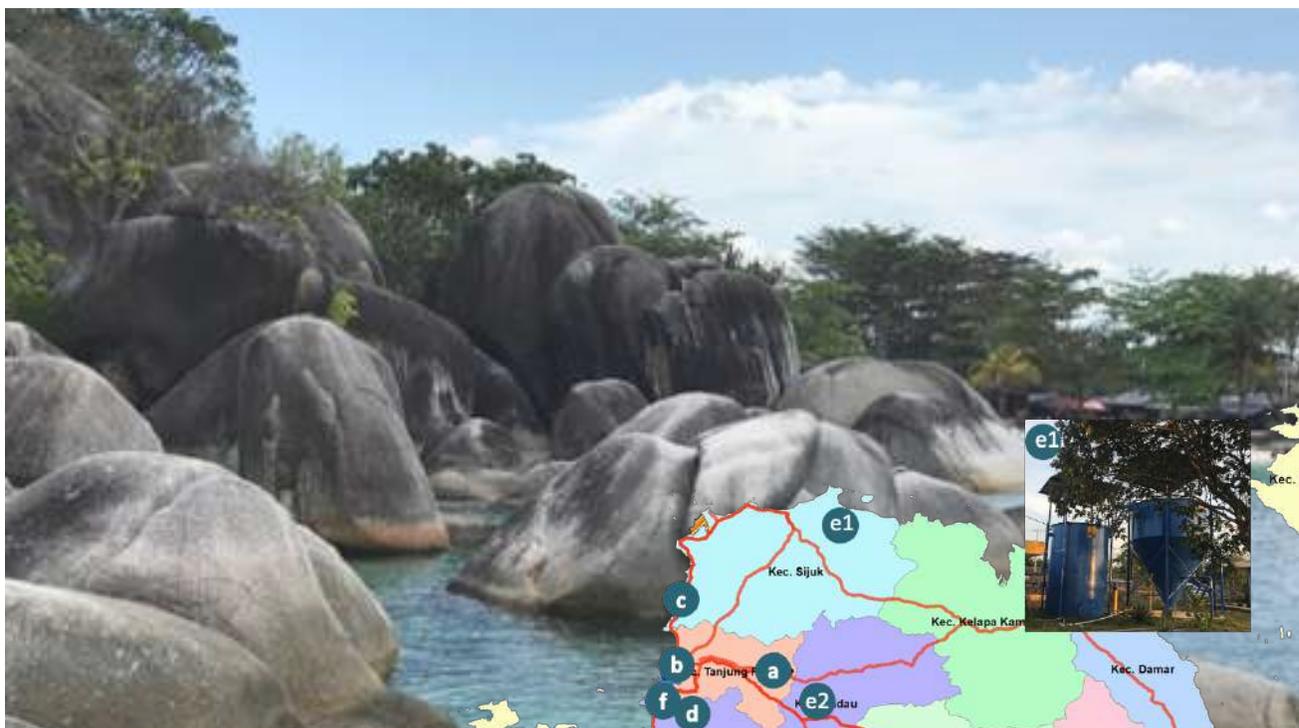
Kabupaten Karimun

- Pantai Pongkar
- PT Sembawang Shipyard
- PT Oiltanking Karimun
- Pantai Pelawan
- PT Soma Daya Utama Energi
- Karimun Power Plan
- PT Saipen

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan dan Karimun (Provinsi Kep. Riau)

03. MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kawasan Strategis: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)



KEK Tanjung Kelayanag (Provinsi Kep. Bangka Belitung)

03. MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kawasan Strategis: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)



Keterangan gambar:

- a** Kalicaa Villa Estate
- b** Rencana Theme Park

- c** Ilustrasi Marina Sea Front

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Infrastruktur yang telah dibangun



KEK Mandalika

Keterangan gambar:

- a** Jalan Luar Kawasan Sisi Barat
- b** Bandara Iti Lombok
- c** Pelabuhan Lembar
- d** Pelabuhan Kayangan
- e** Pelabuhan Bangsal



KEK Mandalika (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

03. KEGIATAN LAINNYA



03. KEGIATAN LAINNYA



04. KOORDINASI DENGAN MITRA PEMBANGUNAN:

K/L, Bappeda Provinsi/Kab/Kota, Pengelola Kawasan, Mitra Internasional

MITRA DAERAH

1 Subdit NTT

Bappeda Provinsi NTT dan Bappeda 22 Kota/Kabupaten

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Kabupaten Alor | 13. Kabupaten Rote Ndao |
| 2. Kabupaten Belu | 14. Kabupaten Sabu Raijua |
| 3. Kabupaten Ende | 15. Kabupaten Sikka |
| 4. Kabupaten Flores Timur | 16. Kabupaten Sumba Barat |
| 5. Kabupaten Kupang | 17. Kabupaten Sumba Barat Daya |
| 6. Kabupaten Lembata | 18. Kabupaten Sumba Tengah |
| 7. Kabupaten Malaka | 19. Kabupaten Sumba Timur |
| 8. Kabupaten Manggarai | 20. Kabupaten Timor Tengah Selatan |
| 9. Kabupaten Manggarai Barat | 21. Kabupaten Timor Tengah Utara |
| 10. Kabupaten Manggarai Timur | 22. Kota Kupang |
| 11. Kabupaten Nagekeo | |
| 12. Kabupaten Ngada | |

2 Subdit Maluku dan Maluku Utara

Bappeda Provinsi Maluku dan Bappeda 11 Kab/Kota

- Kabupaten Buru
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten Kepulauan Aru
- Kabupaten Maluku Barat Daya
- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Maluku Tenggara
- Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Kabupaten Seram Bagian Barat
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kota Ambon
- Kota Tual

Bappeda Provinsi Maluku Utara dan Bappeda 10 Kab/Kota

- Kabupaten Halmahera Barat
- Kabupaten Halmahera Tengah
- Kabupaten Halmahera Timur
- Kabupaten Halmahera Selatan
- Kabupaten Halmahera Utara
- Kabupaten Kepulauan Sula
- Kabupaten Pulau Morotai
- Kabupaten Pulau Taliabu
- Kota Ternate
- Kota Tidore Kepulauan

MITRA K/L



Kemenparekraf



BPIW, KemenPUPR



Kemenperindustrian



Kemendes PDTT



Kemendagri



Kemenko Perekonomian

MITRA PEMBANGUNAN



DFAT



UKCCU

MITRA DAERAH

3 Subdit Papua Barat

Bappeda Provinsi Papua Barat dan Bappeda 13 Kab/Kota

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Kabupaten Fakfak | 8. Kabupaten Sorong |
| 2. Kabupaten Kaimana | 9. Kabupaten Sorong Selatan |
| 3. Kabupaten Manokwari | 10. Kabupaten Tambrau |
| 4. Kabupaten Manokwari Selatan | 11. Kabupaten Teluk Bintuni |
| 5. Kabupaten Maybrat | 12. Kabupaten Teluk Wondama |
| 6. Kabupaten Pegunungan Arfak | 13. Kota Sorong |
| 7. Kabupaten Raja Ampat | |

4 Subdit Papua

Bappeda Provinsi Papua dan Bappeda 29 Kab/Kota

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Kab. Jayapura | 11. Kab. Tolikara | 21. Kab. Deiyai |
| 2. Kab. Sarmi | 12. Kab. Pegunungan Bintang | 22. Kab. Biak Numfor |
| 3. Kab. Keerom | 13. Kab. Mimika | 23. Kab. Dogiyai |
| 4. Kota Jayapura | 14. Kab Mamberamo Raya | 24. Kab. Lanny Jaya |
| 5. Kab. Merauke | 15. Kab. Supiori | 25. Kab. Puncak |
| 6. Kab Boven Digoel | 16. Kab Kepulauan Yapen | 26. Kab Jayawijaya |
| 7. Kab. Mappi | 17. Kab. Waropen | 27. Kab. Mamberamo Tengah |
| 8. Kab. Asmat | 18. Kab. Nabire | 28. Kab Intan Jaya |
| 9. Kab. Puncak Jaya | 19. Kab. Paniai | 29. Kab. Nduga |
| 10. Kab. Yahukimo | 20. Kab. Yalimo | |

MITRA PENGELOLA KAWASAN

BUPP KEK

- KEK Morotai - PT Jababeka Morotai
- KEK Sorong - PT Malamoi Olom Wobok

PENGELOLA KI

- KI Weda Bay
- KI Buli

BADAN OTORITA

Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo

04 | PENUTUP



- Profesi perencana memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan, dan memiliki lingkup peluang karir yang luas dan terbuka diberbagai sektor.
- Perencana dituntut untuk dapat berpikir sistematis dan memiliki kemampuan analitis yang kuat.
- Seluruh pembelajaran dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) di ITB yang melingkupi analisa statistik, ekonomi kewilayahan, analisa wilayah dan kota, analisa spasial dan lainnya menjadi bekal bagi perencana untuk dapat berinteraksi dengan berbagai stakeholders dan menyusun kebijakan perencanaan yang berkualitas.



TERIMA KASIH

Direktorat Regional III

Kedeputan Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-2, Gedung Bappenas Rasuna Said, Lt 9
Kuningan, Jakarta